

**PENGADILAN AGAMA UNAAHA  
LAPORAN KEUANGAN**

**04**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2021**

**Jl. Inolobungadue II No. 830 Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara**

**Telp. (0408) 2421187 Fax. (0408) 2421155**

**Website : <http://www.pa-unaaha.go.id>**

**E-mail : [pa\\_unaaha@live.com](mailto:pa_unaaha@live.com)**

**UNAAHA 93400**



**LAPORAN KEUANGAN**  
**PENGADILAN AGAMA UNAaha**

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021**

**BAGIAN ANGGARAN 005.04**  
**BADAN PERADILAN AGAMA**  
**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Inolobungadue II No. 830**  
**Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara**  
**Telp. (0408) 2421187 Fax. (0408) 2421155**  
**Website : <http://www.pa-unaaha.go.id>**  
**E-mail : [pa\\_unaaha@live.com](mailto:pa_unaaha@live.com)**  
**UNAaha 93400**

# *KATA PENGANTAR*

## Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Unaaha adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Unaaha mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Unaaha. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Unaaha, 27 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,



Rini Surastika Tawulo, S.HI

NIP. 19780803 200912 2 003

## Pengadilan Agama Unaaha

Jl. Inolobungadue II No. 830 Kab. Konawe Propinsi Sulawesi Tenggara

Telp. (0408) 2421187 Fax. (0408) 2421155

Website : <http://www.pa-unaaha.go.id> E-mail : pa\_unaaha@live.com

UNAaha 93400

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Unaaha telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Unaaha, 27 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Unaaha. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA UNAaha' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Rini Surastika Tawulo, S.HI

NIP. 19780803 200912 2 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	11
B.2 Belanja	12
B.3 Belanja Pegawai	13
B.4 Belanja Barang	13
B.5 Belanja Modal	14
B.6 Belanja Bantuan Sosial	16
B.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	17
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	17
C.2 Persediaan	22
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Uang Muka Belanja (prepayment)	
C.6 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.7 Piutang Bukan Pajak	
C.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.9 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.10 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
C.11 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.12 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.13 Persediaan	
C.14 Persediaan yang Belum Diregister	
C.15 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	
C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	23
C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya	23
C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	24
C.19 Tanah	25
C.20 Tanah Belum Diregister	26
C.21 Peralatan dan Mesin	26
C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister	27
C.23 Gedung dan Bangunan	27
C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister	27
C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan	28
C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	28
C.27 Aset Tetap Lainnya	28
C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister	28
C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan	29

C.30	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	29
C.31	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	29
C.32	Aset Tak Berwujud	30
C.33	Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	30
C.34	Aset Lain-lain	31
C.35	Aset Lainnya yang Belum Diregister	32
C.36	Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	32
C.37	Utang kepada Pihak Ketiga	32
C.38	Utang Yang Belum Ditagihkan	33
C.39	Hibah Yang Belum Disahkan	33
C.40	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	33
C.41	Pendapatan Diterima Dimuka	34
C.42	Uang Muka dari KPPN	34
C.43	Utang Jangka Pendek Lainnya	35
C.44	Ekuitas	35
C.45	Catatan Penting Lainnya neraca	35
D.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	36
D.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	36
D.2	Beban Pegawai	36
D.3	Beban Persediaan	37
D.4	Beban Barang dan Jasa	37
D.5	Beban Pemeliharaan	38
D.6	Beban Perjalanan Dinas	38
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	38
D.8	Beban Bantuan Sosial	39
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	39
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	40
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	40
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	40
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	41
D.14	Pos Luar Biasa	41
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	41
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
E.1	Ekuitas Awal	42
E.2	Surplus (Defisit) LO	42
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	42
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	42
E.5	Transaksi Antar Entitas	44
E.6	Ekuitas Akhir	45
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	46
VI.	Lampiran dan Daftar	

## RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp67.340.500 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp67.340.500 atau mencapai 310,04 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp21.720.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp262.710.000 atau mencapai 100,00 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp262.710.000.

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2021. Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp129.700 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp129.700; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0 dan Rp129.700

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp0 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp167.377.300 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-167.377.300, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-167.377.300.

### 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 sebesar Rp0, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-167.377.300 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 196.666.500 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp29.289.200

## **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

## DAFTAR TABEL

1	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	10
2	Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2021 dan 2020	10
3	Perbandingan PNBP Lainnya Semester II TA 2021 dan 2020	11
4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2021	12
5	Perbandingan Belanja Pegawai Semester II TA 2021 dan 2020	12
6	Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2021 dan 2020	13
7	Perbandingan Belanja Modal Semester II TA 2021 dan 2020	14
8	Perbandingan Belanja Modal Tanah Semester II TA 2021 dan 2020	14
9	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2021 dan 2020	14
10	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2021 dan 2020	15
11	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Semester II TA 2021 dan 2020	15
12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Semester II TA 2021 dan 2020	15
13	Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2021 dan 2020	16
14	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester II TA 2021 dan 2020	17
15	Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Semester II TA 2021 dan 2020	
16	Kas Lainnya dan Setara Kas Semester II TA 2021 dan 2020	
17	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Semester II TA 2021 dan 2020	
18	Rincian Uang Muka Belanja (prepayment) Semester II TA 2021 dan 2020	
19	Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Semester II TA 2021 dan 2020	
20	Rincian Piutang Bukan Pajak Semester II TA 2021 dan 2020	
21	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Semester II TA 2021	
22	Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester II TA 2021 dan 2020	
23	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Semester II TA 2021 dan 2020	
24	Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester II TA 2021 dan 2020	
25	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester II TA 2021 dan 2020	
26	Rincian Persediaan Semester II TA 2021 dan 2020	
27	Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester II TA 2021 dan 2020	23
28	Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester II TA 2021 dan 2020	
29	Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Semester II TA 2021 dan 2020	23
30	Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Semester II TA 2021 dan 2020	24
31	Rincian Tanah Semester II TA 2021	25
32	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Semester II Tahun 2021	
33	Rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Semester II Tahun 2021	
34	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	32
35	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga	32
36	Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan	33
37	Rincian Hibah Yang Belum Disahkan	33
38	Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan adalah sebagai berikut	
39	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut	33
40	Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :	35
41	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya adalah sebagai berikut	35
42	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2021 dan 2020	36
43	Rincian Beban Pegawai Semester II TA 2021 dan 2020	36
44	Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2021 dan 2020	37
45	Rincian Beban Barang dan Jasa Semester II TA 2021 dan 2020	37

46	Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2021 dan 2020	38
47	Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2021 dan 2020	38
48	Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II TA 2021 dan 2020	39
49	Rincian Beban Bantuan Sosial Semester II TA 2021 dan 2020	39
50	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester II TA 2021 dan 2020	39
51	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Semester II TA 2021 dan 2020	40
52	Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Semester II TA 2021 dan 2020	40
53	Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Semester II TA 2021 dan 2020	40
54	Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester II TA 2021 dan 2020	41
55	Rincian Pos Luar Biasa Semester II 2021 dan 2020	41
56	Rincian Koreksi Nilai Persediaan	42
57	Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2021	43
58	Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021	44
59	Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2021	44
60	Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021	44
61	Rincian Transfer Keluar Tahun 2021	45
62	Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :	45

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

U R A I A N	Catatan	TA 2021		% thd Angg	TA 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN DAN HIBAH</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	21.720.000	67.340.500	310,04	65.678.500
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>21.720.000</b>	<b>67.340.500</b>	<b>310,04</b>	<b>65.678.500</b>
<b>BELANJA</b>	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	262.710.000	262.710.000	100,00	240.150.000
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>262.710.000</b>	<b>262.710.000</b>	<b>100,00</b>	<b>240.150.000</b>

## LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2021	2020
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
<b>Jumlah Pendapatan</b>		-	-
<b>BEBAN</b>			
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	1.167.300	1.113.947
Beban Barang dan Jasa	D.4	-	-
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	166.210.000	199.900.000
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
<b>Jumlah Beban</b>		<b>167.377.300</b>	<b>201.013.947</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(167.377.300)</b>	<b>(201.013.947)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.11	-	-
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.12	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.13	-	-
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		-	-
<b>Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa</b>		<b>(167.377.300)</b>	<b>(201.013.947)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	D.14		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>		<b>(167.377.300)</b>	<b>(201.013.947)</b>

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	Catatan	2021	2020
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	-	108.800
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	(167.377.300)	(201.013.947)
<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	E.3	-	-
<b>KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS</b>	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
<b>Jumlah</b>		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	196.666.500	175.476.647
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		29.289.200	(25.537.300)
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.6	<b>29.289.200</b>	<b>(25.428.500)</b>

**NERACA**  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

U R A I A N	Catatan	2021	2020
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.9	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Penjualan	C.10	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.11	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C.12	-	-
Persediaan	C.2	129.700	129.700
Persediaan yang Belum Diregister	C.3	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.15	-	-
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	C.16	-	-
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.17	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang	C.18	-	-
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.19	-	-
Tanah Belum Diregister	C.20	-	-
Peralatan dan Mesin	C.21	-	-
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	C.22	-	-
Gedung dan Bangunan	C.23	-	-
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	C.24	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.25	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	C.26	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.27	-	-
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.28	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.29	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.30	-	-
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	C.30	-	-
Aset Tak Berwujud	C.31	-	-
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.32	-	-
Aset Lain-lain	C.33	-	-
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.34	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.35	-	-
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.36	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.37	-	-
Hibah Yang Belum Disahkan	C.38	-	-
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.39	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.40	-	-
Uang Muka dari KPPN	C.41	-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.42	-	-
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.43	129.700	129.700
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>129.700</b>	<b>129.700</b>

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

*Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis*

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Unaaha bagian dari 4 lingkungan peradilan menyusun rencana strategis 2020-2024 yang setiap tahunnya tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan.

Adapun visi Pengadilan Agama Unaaha yang akan menjadi pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan dalam 5 tahun ke depan adalah:

#### **“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA UNAaha YANG AGUNG”**

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Unaaha menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik, Misi Pengadilan Agama Unaaha, yaitu:

- 1) Menjaga kemandirian badan peradilan
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

Dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah dikemukakan sebelumnya, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis organisasi.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
- b) Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Unaaha

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis yang juga di adopsi Pengadilan Agama Unaaha, sebagai berikut :

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum;

- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;
  
- k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
  
- l. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
- m. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- q. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## **A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Unaaha. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

## **A.3 BASIS AKUNTANSI**

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## **A.4. DASAR PENGUKURAN**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## **A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Unaaha. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

#### *Pendapatan-LRA*

### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan-LO*

### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
  - a Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - b Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode
  - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

#### *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset

#### *Aset Lancar*

#### **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta

asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan	
<b>Lancar</b>	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
<b>Kurang Lancar</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
<b>Diragukan</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
<b>Macet</b>	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.  2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.  2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca
  - \* harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - \* harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - \* harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

*Aset Tetap*

**b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah

maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

#### *Penyusutan Aset Tetap*

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah;
  - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.  
Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### ***Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap***

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### *Piutang Jangka Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima

dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai

#### Aset Lainnya

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

#### Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### Kewajiban

#### (6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### Ʒ Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### Ƨ Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2021	Anggaran Setelah Revisi
<b>Pendapatan</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	21.720.000	21.720.000
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>21.720.000</b>	<b>21.720.000</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	262.710.000	262.710.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>262.710.000</b>	<b>262.710.000</b>

Realisasi Pendapatan  
Rp67.340.500

**B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp67.340.500 atau mencapai 310,04 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp21.720.000. Pendapatan Pengadilan Agama Unaha terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp67.340.500 dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2021		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Negara Bukan Pajak	21.720.000	67.340.500	310,04
<b>Jumlah</b>	<b>21.720.000</b>	<b>67.340.500</b>	<b>310,04</b>

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami kenaikan sebesar 2,53 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

*Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	67.340.500	65.678.500	2,53
<b>Jumlah</b>	<b>67.340.500</b>	<b>65.678.500</b>	<b>2,53</b>

Realisasi Penerimaan  
Negara Bukan Pajak  
Rp67.340.500

**B.1.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak**

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp67.340.500 dan Rp65.678.500. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 2,53 dari TA 2020 penurunan target pendapatan karena bertambahnya perkara e-court yang menyederhanakan panggilan pihak berperkara, namun ada kenaikan di pendapatan ongkos perkara karena bertambahnya jumlah perkara yang masuk. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak:

*Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI	REALISASI T.A.	%
--------	-----------	----------------	---

URAIAN	T.A.2021	2020	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	67.340.500	65.678.500	2,53
<b>Jumlah</b>	<b>67.340.500</b>	<b>65.678.500</b>	<b>2,53</b>

Sedangkan Rincian PNBP Lainnya adalah sebagai berikut :

*Perbandingan PNBP Lainnya Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Pendapatan Ongkos Perkara	26.190.000	23.490.000	11,49
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	41.150.500	42.188.500	(2,46)
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>67.340.500</b>	<b>65.678.500</b>	<b>2,53</b>

Realisasi Belanja  
Rp262.710.000

## B.2 Belanja

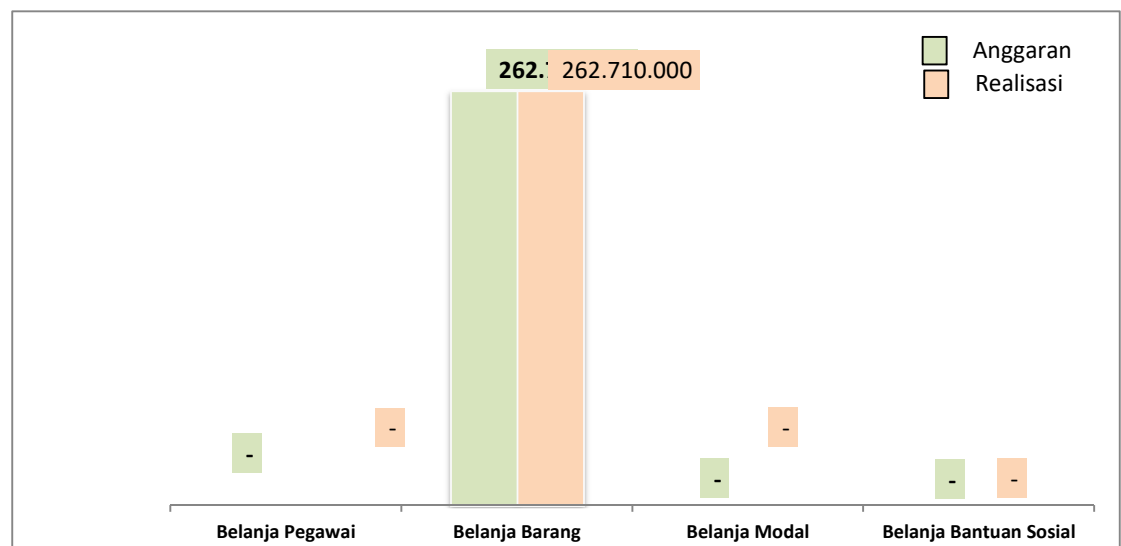
Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp262.710.000 atau 100,00 % dari anggaran belanja sebesar Rp.262.710.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2021*

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	262.710.000	262.710.000	100,00
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>262.710.000</b>	<b>262.710.000</b>	<b>100,00</b>

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

*Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2021*



Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,39% Kenaikan realisasi belanja dari tahun sebelumnya karena bertambahnya pagu anggaran dan kebutuhan masyarakat akan anggaran prodeo, pos bantuan hukm dan sidang

*Perbandingan Realisasi Belanja Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	262.710.000	240.150.000	9,39
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>262.710.000</b>	<b>240.150.000</b>	<b>9,39</b>

*Realisasi Belanja  
Pegawai Rp0*

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 sebesar 0,00 % dari TA 2020. Hal ini disebabkan Tidak terdapat belanja Pegawai pada alokasi DIPA

*Realisasi Belanja  
Barang Rp262.710.000*

### B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp262.710.000 dan Rp240.150.000. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 9,39% dari Realisasi TA 2020.

Hal ini antara lain disebabkan oleh terdapat kenaikan pada Belanja Non operasional untuk pembebasan biaya perkara dan Belanja Jasa Pos Bantuan Hukum, namun Belanja Perjalanan sidang diluar gedung mengalami penurunan sesuai alokasi anggaran pada DIPA

*Perbandingan Belanja Barang Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A. 2021	REALISASI T.A. 2020	%
Belanja Barang Operasional	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional	71.500.000	25.350.000	182,05
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	-	-	-
Belanja Jasa	25.000.000	14.900.000	67,79
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	166.210.000	199.900.000	(16,85)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>262.710.000</b>	<b>240.150.000</b>	<b>9,39</b>
Pengembalian Belanja	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>262.710.000</b>	<b>240.150.000</b>	<b>9,39</b>

---

*Realisasi Belanja Modal  
Rp0*

## **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2021 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2020 disebabkan oleh Tidak terdapat alokasi Belanja Modal pada DIPA.

---

*Realisasi Belanja Modal  
Tanah Rp0*

### **B.5.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2021 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan oleh Tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal tanah.

*Realisasi Belanja Modal  
Peralatan dan Mesin  
Rp0*

### **B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan oleh Tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

---

*Realisasi Belanja Modal  
Gedung dan Bangunan  
Rp0*

### **B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2020. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal gedung dan bangunan.

---

*Realisasi Belanja  
Modal, Jalan, Irigasi dan  
Jaringan Rp0*

### **B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan Tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan.

*Realisasi Belanja Modal  
Lainnya Rp0*

### **B.5.5 Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2020. Hal ini disebabkan Tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal lainnya.

---

*Realisasi Belanja  
Bantuan Sosial Rp0*

### **B.5.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2021 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2020. Belanja Bantuan Sosial .

### **B.5.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran**

## **C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA**

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran Rp0*

### **C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-

masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Semester II TA 2021 dan 2020*

Keterangan	TAHUN 2021	TAHUN 2020
-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :*

*Persediaan Rp129.700*

### **C.2 Persediaan**

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp129.700 dan Rp129.700. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan Semester II TA 2021 dan 2020*

Jenis	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Barang Konsumsi	129.700	129.700
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>

Persediaan tersebut di atas dalam kondisi baik

*Persediaan yang Belum Diregister Rp0*

### **C.3 Persediaan yang Belum Diregister**

Nilai Persediaan yang Belum Diregister per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

*Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Rp0*

### **C.4 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Semester II TA 2021 dan 2020*

Debitur	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### C.16 Piutang Tagihan Penjualan Angsuran

Nilai Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2021 untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Tagihan Penjualan Angsuran Semester II TA 2021 dan 2020*

Debitur	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

### C.17 Piutang Jangka Panjang lainnya

Nilai Piutang Jangka Panjang lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Piutang Jangka Panjang lainnya adalah piutang yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 (duabelas) bulan sejak tanggal pelaporan namun tidak dapat dikategorikan sebagai piutang jangka panjang atas tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, penerusan pinjaman dan kredit pemerintah. Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya per untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Piutang Jangka Panjang lainnya Semester II TA 2021 dan 2020*

U R A I A N	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020
Piutang Jangka Panjang lainnya	-	-
	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

### C.18 Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang per 31 Desember 2021 untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jgk Panjang Semester II TA 2021 dan 2020*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Panjang	% penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	100%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	-	-
Kurang Lancar	-	-	-

Diragukan	-	-	-
Macet	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-	-	-

Tanah Rp0

### C.19 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*Penjelasan tentang kondisi Tanah*

Tanah Belum Diregister Rp0

### C.20 Tanah Belum Diregister

Nilai aset tetap berupa Tanah Belum Diregister yang dimiliki per per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Peralatan dan Mesin Rp0

### C.21 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Peralatan dan Mesin Belum Diregister Rp0

### C.22 Peralatan dan Mesin Belum Diregister

Nilai Peralatan dan Mesin Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

Gedung dan Bangunan Rp0

### C.23 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Gedung dan Bangunan Belum Diregister Rp0

### C.24 Gedung dan Bangunan Belum Diregister

Saldo Gedung dan Bangunan Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

### C.25 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.0 dan Rp.0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister Rp0

### C.26 Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Aset Tetap Lainnya Rp0

### C.27 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.0 dan Rp.0. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Aset Tetap yang Belum Diregister Rp0*

### **C.28 Aset Tetap yang Belum Diregister**

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp.0 dan Rp.0.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp0*

### **C.29 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Mutasi transaksi pada Konstruksi Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp0*

### **C.30 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

*Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Rp0*

### **C.31 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**

Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kemitraan berupa perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau usaha yang dimiliki. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada . Adapun rincian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga adalah sebagai berikut:

*Aset Tak Berwujud Rp0*

### **C.32 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Pengadilan Agama Unaaha berupa Software.

*Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Rp0*

### **C.33 Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan**

Saldo Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan merupakan aset tak berwujud yang sedang dalam proses pengerjaan atau pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. . Mutasi transaksi pada Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Aset Lain-lain Rp0*

### **C.34 Aset Lain-lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

*Aset Lainnya yang Belum Diregister Rp0*

### **C.35 Aset Lainnya yang Belum Diregister**

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp0 dan Rp0.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 0*

### **C.36 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan

2020 adalah Rp0 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

*Utang kepada Pihak Ketiga Rp0*

### **C.37 Utang kepada Pihak Ketiga**

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut .:

*Utang Yang Belum Ditagihkan Rp0*

### **C.38 Utang Yang Belum Ditagihkan**

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Hibah Yang Belum Disahkan Rp0*

### **C.39 Hibah Yang Belum Disahkan**

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Hibah Yang Belum Disahkan merupakan hibah yang belum disahkan ke KPPN sampai dengan tanggal pelaporan. Adapun rincian Hibah Yang Belum Disahkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

*Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Rp0*

### **C.40 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan**

Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan sebagai berikut :

*Pendapatan Diterima Dimuka Rp0*

### **C.41 Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut :

*Uang Muka dari KPPN Rp0*

berasal dari gedung yang disewakan dengan pembayaran di awal kontrak

### **C.42 Uang Muka dari KPPN**

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Rincian Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut :*

<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
Uang Persediaan	-
Tambahan Uang Persediaan	-
<b>Total</b>	<b>-</b>

*Penjelasan tentang Uang Muka dari KPPN :*

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0

#### C.43 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan utang jangka pendek lain lain yang akan dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Ekuitas Rp129.700

#### C.44 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp129.700. dan Rp129.700. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan

#### C. 45 Catatan Penting Lainnya neraca

### D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Negara Bukan Pajak Rp0

#### D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan tersebut adalah sebagai berikut :"

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN	2021	2020	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

Beban Pegawai Rp0

#### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Persediaan Rp1.167.300

#### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.167.300 dan Rp1.113.947

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,79 persen dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh Kenaikan sedikit persediaan terkait jumlah materai yang dibutuhkan seiring dengan bertambahnya jumlah perkara yang masuk. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A.2021	REALISASI T.A. 2020	%
--------	--------------------	---------------------	---

Beban Persediaan konsumsi	1.167.300	1.113.947	4,79
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>1.167.300,00</b>	<b>1.113.947</b>	<b>4,79</b>

*Beban Barang dan Jasa  
Rp0*

#### **D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban Pemeliharaan  
Rp0*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban Perjalanan Dinas  
Rp166.210.000*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp166.210.000 dan Rp199.900.000

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 16,85 persen disebabkan oleh Terdapat penurunan realisasi perjalanan sesuai pagu anggaran dan kebutuhan, dimana pada tahun sebelumnya ada kegiatan sidang terpadu, namun tahun ini tidak dialokasikan, kemudian terdapat pergeseran alokasi anggaran pada tahapan perencanaan, yaitu berkurangnya alokasi perjalanan namun

*Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2020	%
Beban Perjalanan Biasa	166.210.000	199.900.000	(16,85)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam K	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>166.210.000,00</b>	<b>199.900.000</b>	<b>(16,85)</b>

*Beban Barang Untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat Rp0*

#### **D.7 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2020 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Semester II TA 2021 dan 2020*

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2020	%
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

<b>Jumlah</b>	-	-	-
---------------	---	---	---

*Beban Bantuan Sosial  
Rp0*

#### **D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Beban Penyusutan dan  
Amortisasi Rp0*

#### **D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp0*

#### **D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Surplus (Defisit)  
Penjualan Aset Non  
Lancar Rp0*

#### **D.11 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar**

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Surplus (Defisit)  
Penyelesaian Kewajiban  
Jangka Panjang Rp0*

#### **D.12 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang**

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

*Surplus (Defisit) dari  
Kegiatan Non  
Operasional Lainnya Rp0*

#### **D.13 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya**

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Pos Luar Biasa Rp0*

#### **D.14 Pos Luar Biasa**

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

#### **D.15 Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional**

### **E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal Rp0,00*

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.108.800,00

*Defisit LO Rp.-  
167.377.300,00*

#### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Surplus (Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.-167.377.300,00 dan Rp.-201.013.947,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar

*Dampak Kumulatif  
Perubahan Kebijakan  
Akuntansi/Kesalahan  
Mendasar Rp.0,00*

#### **E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

#### E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas tahun pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

*Penyesuaian Nilai Aset  
Rp.0,00*

##### E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai Persediaan  
Rp0,00*

##### E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

###### *Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Atas  
Reklasifikasi Rp0,00*

##### E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Selisih Revaluasi Aset  
Rp.0,00*

##### E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

###### *Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2021*

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

*Koreksi Aset Tetap Non  
Revaluasi Rp0*

##### E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2021

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Lain-Lain Rp0

**E.4.6 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2021

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Transaksi Antar Entitas  
Rp196.666.500

**E.5 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.196.666.500 dan Rp.175.476.647. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2021

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	262.710.000
Diterima dari Entitas Lain	(67.340.500)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	1.297.000
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Pengesahan Hibah Langsung TAYL	-
<b>Jumlah</b>	<b>196.666.500</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

**E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DKEL sebesar Rp 262.710.000, sedangkan DDEL sebesar Rp 67.340.500

**E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 terdiri dari :

*Rincian Transfer Keluar Tahun 2021*

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.297.000 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>		-

### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2021

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

*Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut :*

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
-	-	-
<b>Total Pengesahan</b>		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
<b>Jumlah</b>		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2021 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir  
Rp29.289.200*

### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.29.289.200,00 dan Rp.-25.428.500,00.

### E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

## F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

## **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

Terdapat jurnal penyesuaian sebesar Rp. 5,263,500,- Peralatan Mesin belum diregister akibat adanya barang dibawah nilai kapitalisasi pada akun belanja Modal, pengadaan meubelair , antara lain locker, layar infokus, kursi besi dan Nakas. Akibat pencatatan aset BMN dari pembelian yang masuk dalam kategori ekstrakomptabel